

## Pengaruh Kemandirian, Efektivitas PAD dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Aceh

Farista Mayanti<sup>1</sup>, Fitriani Rizky<sup>2</sup>, Ricky Ariansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Politeknik Kutaraja  
email: faristamayanti362@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja Banda Aceh – Aceh  
email: fitriani rizky@poltekkutaraja.ac.id; rickyariansyah@poltekkutaraja.ac.id

### Article history

Received:  
August 8, 2023  
Accepted:  
August 8, 2023  
Published:  
August 10, 2023

Page:  
31 – 38

Keywords:  
Regional autonomy,  
Effectiveness of regional  
income,  
Regional expenditure,  
Financial performance



© 2023  
Oleh authors. SingKite Journal;  
Management, Business and  
Entrepreneurship. Artikel ini  
bersifat open access yang didis-  
tribusikan di bawah syarat dan  
ketentuan Creative Commons  
Attribution-ShareAlike 4.0  
International License

**ABSTRACT:** *regional expenditure affect financial performance. Using the census method for sampling, there are 23 districts/cities sampled in this study, namely regency/cities in Aceh in 2018-2021. This study uses a quantitative descriptive method to determine the effect of the variables studied. And technical analysis with the Multiple linear regression analysis was used to test the hypothesis in this study. Based on data collected through documentation of reports on the realization of regency/city budgets in Aceh, it was found that: 1) Regional autonomy has no effect on financial performance; 2) The effectiveness of regional income has no effect on financial performance; 3) Regional expenditure has an effect and is significant on financial performance; and 4) Simultaneously the factors of regional autonomy, effectiveness of regional income, and regional expenditure affect financial performance with a contribution of 94,4 and the influence of other factors not involved in the analysis of financial performance is 5,6%.*

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemandirian, efektivitas pendapatan asli daerah, dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan menggunakan metode sensus untuk pengambilan sampel, terdapat 23 kabupaten/kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota di Aceh tahun 2018-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel yang diteliti. Dan teknik analisis dengan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pendokumentasian laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di Aceh ditemukan bahwa: 1) kemandirian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan; 2) Efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan; 3) Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan; dan 4) Secara simultan faktor otonomi daerah, efektivitas pendapatan daerah, dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan kontribusi sebesar 94,4 dan pengaruh faktor lain yang tidak terlibat dalam analisis kinerja keuangan sebesar 5,6%.

### 1. Pendahuluan

Semenjak era reformasi terjadi, pemerintah pusat dan daerah dituntut agar dapat memberikan pelayanan dan kinerja yang baik mengacu pada kebutuhan, kepuasan, juga keinginan rakyat (Muarif & Indriani, 2019). Juga senafas dengan nuansa otonomi daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah), pemerintah daerah diberi wewenang yang luas mengurus pemerintahan daerahnya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat (Azhar, 2021). Marwah otonomi daerah memberi hak dan

kewajiban bagi daerah mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan bagi kepentingan masyarakat.

Penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dari realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang dianggap masih rendah sehingga kinerja keuangan dianggap tidak baik karena tidak mencapai 100%. Begitu pula penilaian kinerja keuangan di provinsi Aceh yang juga masih rendah (Gustiana, 2022).

Secara persentase pendapatan dan belanja di Aceh tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan data ini tampak adanya trend besar faktor pendapatan diatas belanja. Dimana persentase capaian target pendapatan selalu lebih tinggi dari penyerapan anggaran belanja. Ini bermakna, sebenarnya pemerintah (daerah) Aceh mampu dan mencukupi membiayai belanja. Namun disisi lain, trend tersebut menunjukkan belum optimalnya pemerintah dalam penyerapan anggaran. Realisasi anggaran belanja hanya berada pada kisaran 88% sampai dengan 92% (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023).

Pelaksanaan anggaran yang ideal ditandai dengan penyerapan anggaran yang tinggi disertai dengan *output* (pengeluaran) dan *outcome* (hasil) yang optimal, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Halim, 2014).



Gambar 1 Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah di Aceh

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, adanya kemandirian keuangan daerah bersangkutan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Halim, 2008 dalam Holung dkk, 2021). Misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Upaya pemerintah daerah menciptakan kemandiriannya, dengan juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki berbagai sektor yang dapat mengembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah efektivitas PAD. Dalam memperoleh PAD, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Bagi daerah, selayaknya mampu terus menggali potensi lokalnya untuk sumber pendapatan daerah. Sebagaimana ketentuan undang-undnag, dapat berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sehingga dengan potensi PAD nya menjadi bagian dari penilaian dalam mengelola keuangan daerahnya, agar dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya (Harahap, 2018).

Pengelolaan belanja daerah yang baik akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Belanja yang dimaksud terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan dalam aturan (Permendagri Nomor 13/2006). Belanja daerah yang tepat sasaran dan penggunaannya atau alokasinya akan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, penilaian kinerja daerah, jika realisasi belanja tidak melebihi target yang telah ditetapkan (Awaliyah & Efendri, 2018).

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka secara ilmiah akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kinerja keuangan pemerintah daerah yang berjudul “Pengaruh Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten/Kota di Aceh”.

## 2. Metode Penelitian

### a. Metode

Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif sering kali disebut penelitian korelasional yang juga merupakan bagian dari penelitian kuantitatif eksplanatif. Penelitian eksplanatif asosiatif bertujuan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian terhadap derajat hubungan atau korelasi antar variabel (Sugeng, 2022).

### b. Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang diamati adalah kemandirian, efektivitas PAD, dan belanja daerah sebagai variabel *independent*. Terhadap kinerja keuangan sebagai variabel *dependent*. Analisis asosiatif variabel menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2018-2021.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Anynda & Hermanto, 2020). Untuk mengukurnya digunakan persamaan berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemandirian Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan didalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Anynda & Hermanto, 2020). Dan mengukur variabel ini dinyatakan dengan persamaan:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Efektifitas PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (Permatasari & Trianingsih, 2022). Dengan ukurannya dinyatakan sebagai:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Dan variabel belanja daerah dinyatakan mengalokasikan belanja dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan dalam aturan (Permendagri Nomor 13/2006).

### c. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel bebas yaitu kemandirian ( $X_1$ ), efektivitas PAD ( $X_2$ ), dan belanja daerah ( $X_3$ ) terhadap variabel terikat yaitu kinerja keuangan ( $Y$ ) dengan bantuan perangkat lunak statistik *Statistical Program for Social Science* (SPSS) versi 26. Adapun uji yang akan digunakan dengan uji F, uji t, uji koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik untuk metode analisis regresi linear berganda.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 1). Analisis Statistik Deskriptif

##### a). Hasil Penelitian

Deskripsi variabel penelitian diperlukan untuk memberi gambaran tentang statistik data yang digunakan dalam penelitian ini. Secara statistik deskriptif, variabel-variabel yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian	92	.009	1.100	.14286	.115009
Efektivitas PAD	92	.068	1.780	.90880	.236438
Belanja Daerah	92	.714	1.549	1.03368	.111791
Kinerja Keuangan	92	.645	1.401	.97705	.092557
Valid N (listwise)	92				

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata dari variabel yang diteliti pada kabupaten/kota di Aceh tahun 2018-2021 dengan jumlah populasi 92 kabupaten/kota untuk 4 tahun pengamatan. Kinerja keuangan diperoleh nilai terendah sebesar 0,645, yang berarti bahwa jumlah kinerja keuangan terendah sebesar 64,5% dimiliki oleh Kabupaten Pidie pada tahun 2020. Nilai tertinggi sebesar 1,401, yang berarti bahwa kinerja keuangan tertinggi sebesar 140,1% dimiliki oleh Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2018. Nilai rata-rata kinerja keuangan sebesar 0,97705 dengan standar deviasinya sebesar 0,092557.

Kemandirian diperoleh nilai terendah 0,009, yang berarti bahwa kemandirian keuangan daerah terendah sebesar 0,9% dimiliki oleh Kabupaten Subulussalam pada tahun 2018. Nilai tertinggi sebesar 1,100, yang berarti bahwa kemandirian keuangan daerah sebesar 110% dimiliki oleh Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020. Nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 0,12486 dengan standar deviasinya 0,115009.

Efektivitas PAD diperoleh nilai terendah sebesar 0,068, yang berarti bahwa efektivitas PAD terendah sebesar 6,8% dimiliki oleh Kabupaten Subulussalam pada tahun 2018. Nilai tertinggi sebesar 1,780, yang berarti efektivitas PAD tertinggi sebesar 178% dimiliki oleh Kabupaten Simeulue pada tahun 2021. Nilai rata-rata efektivitas PAD sebesar 0,90880 dengan standar deviasinya 0,236438.

Belanja daerah diperoleh nilai terendah sebesar 0,714 yang berarti bahwa belanja daerah terendah sebesar 71,4% dimiliki oleh Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2018. Nilai tertinggi sebesar 1,549, yang berarti belanja daerah tertinggi sebesar 154,9% dimiliki oleh Kabupaten Pidie pada tahun 2020. Nilai rata-rata belanja daerah sebesar 1,03368 dengan standar deviasinya 0,111791.

#### 2). Uji Persyaratan Model Regresi

##### a) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan atas dasar nilai koefisien korelasi. Jika terjadi korelasi tinggi, maka dinamakan *problem autokorelasi*. Untuk mengujinya dilakukan dengan Uji Durbin Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 maka terindikasi terjadinya autokorelasi (Ghozali, 2016). Adapun uji autokorelasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Hasil uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson sebesar 2,129 dibandingkan dengan nilai D-W tabel yang bernilai antara  $dL = 1,452$  dan  $dU = 1,587$  pada taraf signifikansi 5% dan  $k = 3$ . Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa, data penelitian aman dari autokorelasi, karena Durbin Watson terletak antara  $dU$  dan  $(4 - dU)$ .

Tabel 2 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 <sup>a</sup>	.944	.942	.022269	2.129

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Kemandirian, Efektivitas PAD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

### b). Uji Multikolinearitas

Model regresi berganda dikatakan fit jika tidak ditemukan adanya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel independen. Untuk mengujinya dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (Saputri, 2020). Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 3.

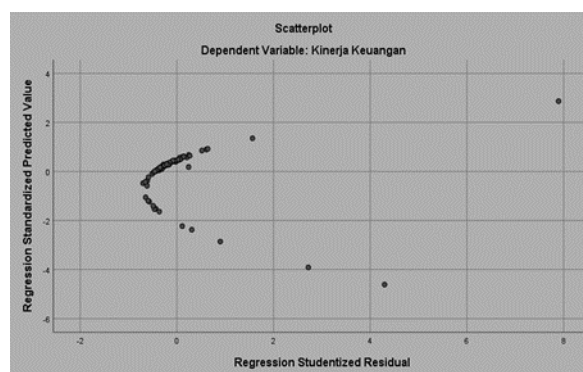
Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Regresi	(Constant)		
	Kemandirian	.987	1.013
	Efektivitas PAD	.961	1.041
	Belanja Daerah	.951	1.052

Diperoleh nilai *tolerance* ketiga variabel independennya diatas 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) k kurang dari 10, maka antar variabel independen tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### c). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah metode yang berguna untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan antar varians variabel dalam model regresi atau tidak. Untuk itu diuji dengan atau melalui grafik *scatterplot*, yaitu titik-titik yang menyebar secara acak, yang terdapat diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y (Anynda & Hermanto, 2020). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat Gambar 2, yang menyatakan aman dari heteroskedasitas.



Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

## 3). Uji Model

### a). Uji Model Secara Simultan

Model penelitian antar variabel dalam penelitian ini secara matematis dapat ditulis  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$ . Adapun hasil pengujian secara simultan (Uji F) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Uji Model Analisis Secara Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.736	3	.245	494.679	.000 <sup>b</sup>
Residual	.044	88	.000		
Total	.780	91			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD

Hasil pengujian secara simultan diketahui nilai F-hitung = 494,679 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  diketahui sebesar 2,704 dimana  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 (<5%). Hal tersebut mengandung makna bahwa kemandirian, efektivitas PAD, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

#### b). Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan untuk melihat pengaruh dari setiap variabel independen kemandirian, efektivitas PAD, dan belanja daerah terhadap variabel dependen kinerja keuangan. Untuk menguji tingkat signifikansi uji hipotesis ini dilakukan dengan signifikansi sebesar  $< 0,05$  ( $\alpha=5\%$ ). Hasil uji secara parsial dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Pengujian Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
Regresi (Constant)	1.810	.023		79.402	.000
Kemandirian	-.008	.020	-.010	-.377	.707
Efektivitas PAD	.000	.010	.000	.017	.987
Belanja Daerah	-.805	.021	-.973	-37.603	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Adapun hasil pengujian tersebut dapat dianalisis berikut:

- 1) Hasil pengujian membuktikan variabel kemandirian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Karena statistic uji t-hitung = -0,377 dan tingkat signifikansi sebesar 0,707 ( $> 0,05$ ).
- 2) Hasil uji variabel efektivitas PAD juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Karena nilai t-hitung = 0,017 dan tingkat signifikansi sebesar 0,987 ( $> 0,05$ ).
- 3) Sedangkan variabel belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dimana t-hitung= 37,603 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ).

#### 4. Simpulan

Hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi antar variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga model analisis regresi linear berganda secara matematis dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,810 - 0,008 X_1 + 0,000 X_2 - 0,805 X_3 + 0,023$$



Maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Secara simultan variabel Kemandirian (X1), Efektivitas PAD (X2) dan Belanja Daerah (X3) signifikan berkontribusi terhadap kinerja keuangan di daerah Aceh. Hal ini diperkuat dari nilai korelasi dan deyerminasinya. Hasil penelitian ini terbukti bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,972 dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) juga tinggi yakni 0,994. Artinya hubungan kemandirian, efektivitas PAD, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan sangat erat. Hal tersebut mengandung makna bahwa kemandirian, efektivitas PAD, dan belanja daerah memberi kontribusi terhadap kinerja keuangan sebesar 94,4%.
- 2) Namun secara parsial hanya variabel Belanja Daerah (X3) yang nerpengaruh secara statistic dengan periode data tahun 2018-2021, yakni secara markinal pengaruhnya negative sebesar -0,805 yang mengandung makna bahwa setiap kenaikan variabel Belanja Daerah sebesar 10% maka variabel menurunkan kinerja keuangan sebesar 8,05%.

## Daftar Pustaka

- Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Awaliyah, S. R., & Efendri. (2018). Pengaruh Belanja Daerah, Pajak Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Kajian SiLPA APBD Pemerintah Daerah di Aceh: Benarkah Akibat Terhambatnya Penyerapan APBD?*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4054-kajian-silpa-apbd-pemerintah-daerah-di-aceh-benarkah-akibat-terhambatnya-penyerapan-apbd.html>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustiana, A. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2020-2021. Buku 1. (Sumatera dan Jawa)*. [www.bps.go.id/publication/2022/03/21/4f1dce32e3b62a41a3e5d4ca/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2020-2021-buku-1-sumatera-jawa-.html](http://www.bps.go.id/publication/2022/03/21/4f1dce32e3b62a41a3e5d4ca/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2020-2021-buku-1-sumatera-jawa-.html)
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Harahap, A. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang. *Jurnal Bisnis Net*. (1), 1–13. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/43>.
- Holung, R. L., Kawug, G. M. V., & Tumangkeng, S. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 869–877. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32595>.
- Muarif, & Indriani, M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(4), 618–634.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permatasari, D. A., & Trisnaningih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(6), 832–846. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>.

- Saputri, S. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung. *Riset Dan Akuntansi*, 1999(23), 452–459.
- Sugeng, B. (2022). *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah